

**ANALISIS PUNGUTAN RENTE EKONOMI KAYU BULAT HUTAN TANAMAN
INDUSTRI DI INDONESIA**

Economic Rent Analysis of Timber Estate Log Production in Indonesia

Oleh/By:

Transtoto Handadhari, Achmad Sumitro, Sofyan P. Warsito dan/and

Sri Widodo

Abstract

The low of government revenues from log produced of timber estates is caused by the slow of timber estate development as well as the weakness of economic rent system implementation. Policy to decrease the use of natural forest logs, and to develop timber estates in the future, should consider to review the economic rent system.

Abstrak

Rendahnya perolehan pungutan kayu bulat hutan tanaman industri, di samping karena lambatnya pembangunan hutan tanaman, juga dikarenakan sistem pemungutan rente ekonomi yang lemah. Kebijakan pengurangan produksi kayu bulat hutan alam, dan rencana pembangunan hutan tanaman ke depan mendorong perlunya dilakukan perbaikan sistem pungutan rente ekonomi kayu bulat hutan tanaman.

Kata Kunci (*Keywords*): hutan tanaman (*timber estate*), keuntungan usaha (*profitability*), pungutan kayu bulat (*log charges*) dan rente ekonomi (*economic rent*).

I. LATAR BELAKANG

Hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar atau sekitar 62,6% dari luas daratan Indonesia, telah mengalami deforestasi dan degradasi yang cukup besar. Deforestasi mencapai sekitar 1,6 juta hektar per tahun pada periode 1985-1997, dan meningkat menjadi 2,83 juta hektar per tahun pada periode 1997-2000 antara lain akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan seluas 9,7 juta hektar tahun 1997. Ketersediaan volume kayu tegak (*standing stock*) semua jenis di hutan produksi (HP, HPT, HPK) berdiameter di atas 50 cm yang pada tahun 1995 ditaksir mencapai angka 8.851,7 juta meter kubik, diantaranya terdapat 2.059,9 juta m³ kayu jenis komersial, pada tahun 2000 dinyatakan

menurun menjadi 3,95 miliar m³ untuk seluruh stok kayu tegak semua jenis di hutan produksi berdiameter 50 cm ke atas, menurun cukup tajam sebesar 55,38% (Ditjen Intag, 1994; Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, 2000; Handadhari, 2000).

Selanjutnya, untuk merehabilitasi hutan rusak, serta mempertahankan dan meningkatkan penyediaan bahan baku kayu bulat, pemerintah mulai tahun 1985-an mengembangkan hutan tanaman melalui sistem hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI), dikukuhkan berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1990. Namun, berdasarkan data Ditjen Pengusahaan Hutan (1997) program pembangunan HTI mulai tahun 1984 sampai 1996 di atas baru mampu membangun hutan tanaman sekitar 1,2 juta ha dari total target seluas 6,25 juta hektar yang ditetapkan untuk dibangun sampai dengan tahun 2000. Berdasarkan data Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman (2001), sampai dengan Agustus 2001 realisasi tanaman HTI baru mencapai angka seluas 1.987.628 hektar.

Tidak berhasilnya pencapaian target pembangunan HTI serta rendahnya produksi kayu bulat asal HTI yang masih berfluktuasi sebesar 4,83 juta m³ pada tahun 1999/2000, turun menjadi 3,78 juta m³ pada tahun 2000, naik menjadi sebesar 5,6 juta m³ pada tahun 2001, 4,16 juta meter kubik tahun 2002 (Direktorat Bina Produksi Kehutanan, 2002), menyebabkan kontribusinya terhadap pasokan industri pengolahan kayu tahun 2001 baru sebesar 1,5% dari total pasokan kayu bulat yang tercatat (ITTO, 2001). Pungutan terhadap kayu bulat HPHTI ditetapkan dalam bentuk provisi sumberdaya hutan (PSDH) dengan tarif sekitar Rp. 3.500,- per m³ jumlahnya juga relatif sangat kecil. Retribusi daerah dan pungutan-pungutan terhadap produksi log eks HPHTI bervariasi antara Rp. 1.000,- per m³ (Sumsel) sampai sebesar rata-rata Rp. 5.520,- per m³ (Kaltim), dengan rata-rata tertimbang Rp. 1.743,91,- per m³.

Pembatasan produksi kayu bulat hutan alam akibat telah berkurangnya potensi tegakan serta rencana pengembangan luas hutan tanaman mendorong dilakukannya perbaikan sistem pungutan yang mampu memberikan pendapatan pemerintah secara proporsional. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keuntungan usaha rill HPHTI dan permasalahan-permasalahannya sebagai bahan pertimbangan penetapan pungutan rente ekonomi kayu bulat produksi HPHTI yang lebih rasional, dan pedoman pengembangan hutan tanaman lebih lanjut.

II. METODE PENELITIAN

A. Sasaran Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan HPHTI jenis tanaman akasia di seluruh Indonesia dengan beberapa sampel ditetapkan pada HPHTI wilayah Riau, Jambi, Kalsel, Kaltim sebanyak 9 unit sampel HPHTI yang memiliki tingkat manajemen yang baik, yang dipanen pada tahun 2002.

B. Jenis Data

Data yang diambil berupa data luas hutan tanaman, hasil produksi kayu bulat, angka riil pembiayaan dan penjualan hasil produksi, jenis dan jumlah pungutan.

C. Metode Analisis

Uji analisis terhadap pungutan produk kayu bulat HPHTI dilakukan dengan menganalisis perolehan keuntungan pengusaha hutan tanaman yang wajar, sebagai bahan mempertimbangkan besarnya perolehan pungutan rente ekonomi milik pemerintah serta kebijakan penetapan pungutan rente ekonomi pada perusahaan hutan tanaman, sebagai berikut.

(1) Menghitung dan Menganalisis Perolehan Keuntungan Bersih Perusahaan Hutan Tanaman

1.1 Menetapkan Formula Perhitungan Nilai Bersih Perusahaan Hutan Tanaman

Langkah penghitungan nilai perolehan bersih perusahaan hutan tanaman dilakukan dengan menghitung seluruh beban input pembiayaan dan perolehan hasil perusahaan berdasarkan struktur dan tata waktunya masing-masing selama waktu daur tanaman sampai dengan penjualan hasil produksi kayu bulat dengan cara menggunakan *compounding formula*.

Maka berdasarkan asumsi bahwa:

- 1) Penghasilan riil dari usaha hutan tanaman diperoleh pada masa tanam sampai akhir daur;
- 2) Blok tebangan merupakan petak/anakpetak/bagian dari satu unit perusahaan hutan tanaman;

- 3) Masing-masing blok atau petak/anak petak tanaman memiliki luas yang dapat berbeda-beda;
- 4) Masing-masing blok atau petak/anak petak tanaman memiliki tanaman seumur dan tidak selalu sejenis;
- 5) Volume rata-rata per hektar masing-masing tegakan seumur dalam satu blok/petak/anak petak relatif sama;
- 6) Panenan kayu bulat dilakukan dengan sistem tebang habis;
- 7) Biaya manajemen umum perusahaan hutan tanaman setiap tahun relatif tetap;
- 8) Seluruh pajak dan pungutan termasuk dalam pembiayaan perusahaan hutan tanaman,

ditetapkan penggunaan formula sebagai berikut (Handadhari, 2003).

$$NR_{ht} = \frac{\sum_{t=-S}^r I_t (1+i)^{(r-t)+1} - \left\{ \sum_{t=-S}^r (l * A / L)_t (1+i)^{(r-t)+1} + \sum_{t=-S}^r C_{jt} (1+i)^{(r-t)+1} \right\}}{l * \left(\sum_{j=0}^k V_j \right)} \dots (1)$$

di mana:

- NR_{ht} = Jumlah perolehan bersih perusahaan hutan tanaman di lahan kawasan hutan oleh pihak III yang diperoleh pada tahun tebang (Rp/m³).
- I_t = Pendapatan perusahaan hutan tanaman pada tahun ke t , mulai dari tebang penjarangan sampai panen pada akhir daur (Rp.).
- l = Luas lahan tebangan (hektar).
- L = Luas seluruh areal hutan tanaman (hektar).
- A = Biaya manajemen setiap tahun, merupakan biaya rata-rata untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan tanaman (Rp.).
- C_{jt} = Total biaya pengeluaran masing-masing jenis kegiatan j pada tahun ke t , meliputi biaya persiapan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, penebangan, pengangkutan dan penjualan hasil, serta biaya-biaya pembayaran pungutan (Rp.).
- i = Tingkat bunga efektif bank (%).
- r = Umur tebang (tahun).
- S = Waktu dimulainya persiapan penanaman, 1 atau 2 tahun tergantung proyek.
- t = Waktu pelaksanaan proyek, sejak dimulainya persiapan tahun ke s sampai umur tebang ($t = -s, 0, 1, 2, 3 \dots, r$).
- V = Volume rata-rata kayu tegak pada umur tebang (m³/hektar).

1.2 Analisis Keuntungan Bersih

Secara teoritis besarnya keuntungan bersih perusahaan hutan tanaman (*Kht*) diperoleh dengan mengurangi jumlah nilai perolehan kotor perusahaan hutan tanaman dengan jumlah pungutan rente ekonomi (PSDH maupun retribusi daerah) yang dibayarkan kepada pemerintah. Namun dalam penelitian ini pembayaran PSDH dan beban rente ekonomi lainnya telah masuk ke dalam struktur pembiayaan perusahaan kayu bulat, sehingga keuntungan bersih perusahaan kayu bulat oleh pihak III tersebut sepenuhnya sama dengan nilai NR_{ht} ($Kht = NR_{ht}$).

Keuntungan bersih selanjutnya diperbandingkan dengan nilai kelayakan usaha menggunakan kaidah investasi ekonomi berdasarkan kriteria investasi manfaat dan biaya (Gregory, 1987; Sumitro, 2000), yakni: *Net Present Value* (NPV); *Benefit Cost Ratio* (B/C); dan *Internal Rate of Return* (IRR).

Berdasarkan nilai bersih tahun ke-0 pembiayaan (*costs*) dan pendapatan (*benefits*) pada tingkat *discount rate* i :

$$PV(\text{costs}) = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i)^t} \dots\dots\dots (2)$$

$$PV(\text{benefits}) = \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+i)^t} \dots\dots\dots (3)$$

maka,

$$(a) \quad NPV = PV(\text{benefit}) - PV(\text{cost})$$

$$= \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+i)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}$$

$$= \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t} \dots\dots\dots (4)$$

$$(b) \quad B/C \text{ Ratio} = \frac{PV(\text{Benefits})}{PV(\text{Costs})} \dots\dots\dots (5)$$

(c) IRR adalah suku bunga i yang dihasilkan apabila PV (*Benefits*) sama dengan PV (*Costs*), atau NPV sama dengan Nol (NPV = 0).

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t} = 0 \dots\dots\dots (6)$$

di mana:

- PV (*Costs*) = Nilai bersih pada tahun ke-0 atas seluruh pembiayaan yang terjadi pada tahun ke-t berdasarkan *discount rate* tertentu i .
- PV (*Benefits*) = Nilai bersih pada tahun ke-0 atas seluruh pendapatan yang terjadi pada tahun ke-t berdasarkan *discount rate* tertentu i .
- NPV = Perbedaan antara *discounted revenues* dan *discounted expenditures* pada tahun ke-0 berdasarkan tingkat *discount rate* tertentu i .
- B/C = Perbandingan antara *discounted revenues* dan *discounted expenditures* pada pada tahun ke-0 berdasarkan tingkat *discount rate* tertentu i .
- i = Tingkat bunga efektif bank yang berlaku; dalam hal lain adalah *Internal Rate of Return* (IRR) yang diperoleh apabila NPV= 0, yakni tingkat suku bunga yang menggambarkan layak atau tidak layaknya suatu kegiatan ekonomi perusahaan kayu bulat dilakukan.
- B_t = Penghasilan perusahaan kayu bulat pada tahun ke t.
- C_t = Pembiayaan perusahaan kayu bulat pada tahun ke t.
- t = Tahun kegiatan perusahaan kayu bulat (0, 1, 2,.. n).

Tercatat tingkat suku bunga rata-rata (*nominal interest rate*) (R) tahun 1990-2002 adalah 19,39% per tahun, dan tingkat inflasi (F/f) rata-rata sebesar 13,50%. Berdasarkan hal tersebut, suku bunga riil (*real interest rate*) dapat dihitung dengan rumus (Boungiorno, 1987) sebagai berikut.

$$i = \frac{R - F}{1 + f} \dots\dots\dots (7)$$

i = real interest rate = 5,19%.

(2) Analisis Rente Ekonomi Kayu Bulat

Teoritis, jumlah rente ekonomi yang diperoleh pemerintah merupakan pungutan PSDH dan pungutan maupun beban pembiayaan pembangunan lainnya yang dibayarkan oleh pengusaha hutan tanaman yang seharusnya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Untuk perusahaan HPHTI pungutan rente ekonomi khususnya diwujudkan dalam bentuk pungutan PSDH yang ditetapkan pemerintah dan pungutan daerah berupa retribusi daerah terhadap volume produksi kayu. Data pungutan retribusi daerah yang tarifnya berbeda-beda antar daerah beserta pungutan PSDH dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang pada masing-masing sampel perusahaan HPHTI yang diperoleh.

2.1 Analisis Rasio Rente Ekonomi dengan Nilai Keuntungan berdasarkan Keuntungan Konversi Perusahaan Kayu Bulat

Dalam hal seluruh pungutan pemerintah telah dimasukkan dalam struktur pembiayaan pembuatan hutan tanaman, maka nilai keuntungan konversi (CR) adalah sama dengan nilai perolehan bersih perusahaan kayu bulat hutan tanaman (NR_{ht}) ditambah besarnya tarif PSDH maupun retribusi daerah yang dibayarkan.

Selanjutnya berdasarkan asumsi bahwa:

- 1) Sebagian besar atau seluruh biaya dan modal menjadi tanggungan pengusaha hutan tanaman;
- 2) Tidak selalu diperoleh keuntungan dalam usaha hutan tanaman tersebut;
- 3) Resiko kegagalan dan kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pengusaha hutan tanaman;
- 4) Keberhasilan membuat hutan tanaman telah memberikan keuntungan ekologis bagi pemerintah;
- 5) Perlu pembagian yang adil atas hasil keuntungan,

maka secara teoritis perlu dilakukan uji perhitungan besarnya perolehan pemerintah yang dikenakan terhadap perusahaan hutan tanaman dalam beberapa skenario.

Skenario dilakukan dalam penetapan besarnya rasio sebesar antara rente ekonomi yang diperoleh pemerintah dengan keuntungan pengusaha ditetapkan sebagai berikut.

- (1) Rente Ekonomi : Keuntungan Pengusaha = 40 : 60

Diasumsikan merupakan nilai distribusi perolehan penghasilan dari pengusahaan hasil hutan kayu bulat hutan alam yang telah memberikan insentif investasi bagi pengusaha kayu bulat.

(2) Rente Ekonomi : Keuntungan Pengusaha = 50 : 50

Diasumsikan merupakan nilai distribusi perolehan penghasilan dari pengusahaan hasil hutan kayu bulat hutan alam yang wajar dan moderat.

III. HASIL ANALISIS

A. Analisis Nilai Penghasilan Pengusahaan Kayu Bulat dan Rente Ekonomi Milik Pemerintah

Berdasarkan sampel biaya produksi kayu bulat hutan tanaman sistem HPHTI yang dianalisis dari data primer diperoleh hasil sebagai berikut.

(1) Nilai Penghasilan Pengusahaan Kayu Bulat Sistem HPHTI

1.1 Struktur dan Tata Waktu Pembiayaan

Struktur pembiayaan HPHTI terdiri atas pembiayaan manajemen, pengadaan bibit, persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan, penebangan kayu, pengangkutan hasil kayu, dan biaya lain-lain. Pungutan rente ekonomi pemerintah khususnya diwujudkan dalam bentuk pungutan PSDH dan retribusi daerah terhadap produksi kayu bulat. Pajak-pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pungutan langsung perusahaan dimasukkan ke dalam struktur biaya manajemen ataupun biaya lain-lain.

Pembiayaan pembuatan hutan tanaman jenis akasia (*Acasia mangium*) dimulai pada tahun ke -1 sampai dengan umur daur tahun ke 8. Pembiayaan tahun ke -1 khususnya dilakukan untuk pengadaan bibit dan persiapan lapangan. Pemeliharaan tanaman dilakukan pada tahun pertama setelah tanam sampai dengan tahun ke 5. Penebangan dan pengangkutan hasil, serta pembayaran pungutan rente ekonomi dan lainnya dilakukan pada tahun setelah pemanenan.

1.2 Nilai Input Biaya Produksi pada Harga Sekarang

Rata-rata kumulatif input total biaya lapangan pada tahun-tahun bersangkutan untuk pembuatan tanaman akasia sampai dengan umur masak tebang selama daur 8 tahun sebesar Rp 9.614.668,- per hektar atau rata-rata Rp 57.955,65- per m³ dalam posisi

tegak di lapangan. Biaya untuk kegiatan penebangan kayu bulat pada tahun ke 8 bervariasi tergantung jumlah hasil produksinya per hektar. Diperoleh rata-rata kumulatif biaya terbang sebesar Rp 16.601,12,- per m³, dan biaya rata-rata angkutan menuju lokasi konsumen rata-rata sebesar Rp 70.716,70,- per m³.

Jumlah seluruh biaya sampai lokasi konsumen yang dikeluarkan mulai tahun –1 sampai dengan tahun ke 8 tersebut berdasarkan nilai komponding (*compounding value*) pada tingkat bunga riil 5,19% pada saat tahun panen adalah sebesar Rp 162.043,64 per m³.

1.3 Nilai Output Perolehan Pengusahaan Kayu Bulat pada Harga Sekarang

Perolehan pengusahaan kayu bulat sistem HPHTI diwujudkan dalam jumlah produksi kayu bulat per hektar dan satuan harga jual yang dapat dicapai. Sebagai contoh, PT RAPP di Riau memiliki kemampuan memproduksi kayu bulat tertinggi sebesar rata-rata 232 m³ per hektar, sedangkan PT Inhutani III di Tanah Laut Kalimantan Selatan hanya mampu menghasilkan produk kayu bulat rata-rata 50 m³ per hektar.

Rata-rata kumulatif tertimbang produksi kayu bulat HPHTI adalah sebesar 165,89 m³ per hektar. Harga kayu bulat jenis akasia yang diproduksi umumnya bervariasi pada setiap daerah penghasil, yakni antara Rp 150.000,- sampai Rp 266.615,- per m³ di lokasi konsumen kayu bulat, dan rata-rata tertimbang penerimaan HPHTI per hektar Rp 34.979,09 ribu atau Rp 210.857,13 per m³.

1.4 Nilai Keuntungan Pengusahaan Kayu Bulat pada Harga Sekarang

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus NRht/nilai komponding pengusahaan hutan tanaman pada tingkat bunga riil sebesar 5,19% per tahun, diperoleh nilai rata-rata kumulatif keuntungan dari penjualan kayu bulat di lokasi konsumen sebesar Rp 59,75 ribu per m³, atau 36,87% dari total biaya yang dikeluarkan, serta 25,9% dari nilai harga jual kayu bulat Rp 221.787,2 per m³ di lokasi konsumen. Terinci pada Tabel 1.

T

Tabel 1. Hasil Analisa Finansial Keuntungan Pengusahaan Kayu Bulat Sistem HPHTI Tahun 2001/2002 (x Rp.1.000,-) pada Tingkat Bunga Efektif 5,19%

No	Perusahaan	Luas Tebangan (Ha)	Rata-rata Produksi Kayu per Ha (m3/ha)	A	B	C	D	E	Keterangan
				$\sum_{t=-s}^r I_t (1+i)^{(r-t)+1}$	$\sum_{t=-s}^r (lx \frac{A}{L})_t (1+i)^{(r-t)+1}$	$\sum_{t=-s}^r C_{jt} (1+i)^{(r-t)+1}$	$lx \sum V_j$	NR_{ht}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PT. Inhutani III (Kalteng)	1.000,00	50,00	7.889,25	1.353,94	7.361,68	50,00	-16,53	1. NR_{ht} merupakan nilai keuntungan bersih pengusahaan kayu bulat Hutan Tanaman sistem HPHTI (Rp.1.000,-/m3) 2. Biaya manajemen dan Biaya lain-lain konstan
2.	PT ITCI – HM (Kaltim)	1.619,44	114,00	26.981,24	400,76	10.872,04	114,00	137,79	
3.	PT HRB (Kalsel)	13.000,00	150,00	31.294,03	113,50	15.963,50	150,00	101,45	
4.	PT MHP (Sumsel)	14.500,00	150,00	31.557,00	1.482,64	22.542,12	150,00	50,21	
5.	PT Kirana Rimba (Kalsel)	500,00	72,00	16.662,10	583,85	11.096,28	72,00	69,19	
6.	PT TRH (Kaltim)	6.273,09	91,18	22.054,72	132,58	13.060,52	91,18	97,19	
7.	PT WKS (Jambi)	4.864,00	152,00	42.628,75	2.287,17	20.216,56	152,00	132,40	
8.	PT Arara Abadi (Riau)	9.800,00	179,00	50.137,13	2.925,54	32.326,13	179,00	83,16	
9.	PT RAPP (Riau)	16.519,00	232,00	52.712,81	18.608,86	23.894,32	232,00	44,01	
Rata-rata kumulatif		7.563,95	165,90	36.794,51	5.483,54	21.397,88	165,90	59,75	

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2002.

Berdasarkan kajian angka-angka sampel HPHTI tersebut, faktor utama yang menyebabkan untung atau ruginya perusahaan kayu bulat hutan tanaman tersebut adalah jumlah produksi kayu bulat (m^3 per hektar) yang dihasilkan dan harga jual kayu bulat di lokasi konsumen, di samping hal-hal lainnya khususnya menyangkut efisiensi manajemen perusahaan. Adanya hubungan antara produsen kayu bulat HTI dengan konsumen yang umumnya berupa pabrik pulp & paper yang menyebabkan adanya ikatan kontrak pembelian dan penetapan harga yang layak membantu perusahaan HTI memperoleh laba. Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa perusahaan HPHTI yang tidak memiliki ikatan pasar yang kuat dengan industri perkayuan cenderung berpotensi merugi karena harga jual tegakan kayu akasia di lapangan relatif rendah, terlebih lagi apabila jumlah produksi kayu per hektar juga rendah, di bawah $100 m^3$ per hektar.

(2) Pungutan Rente Ekonomi pada Perusahaan Kayu Bulat Sistem HPHTI

Pungutan rente ekonomi pada perusahaan kayu bulat HPHTI berupa PSDH dan pungutan retribusi daerah. Jumlah pungutan PSDH relatif kecil yakni rata-rata kumulatif tertimbang sebesar Rp 3.590,46,- per m^3 . Kecilnya jumlah pungutan PSDH tersebut berkaitan dengan rendahnya harga patokan penjualan kayu bulat eks HTI yang terakhir ditetapkan melalui SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 510/MPP/Kep/6/2002, yakni Rp 27.800,- per m^3 untuk jenis *Acacia mangium* dan Rp 17.000,- per m^3 untuk jenis Albisia (sengon). Padahal harga lapangan jenis akasia,

meskipun masih relatif rendah, adalah sekitar Rp 75.000,- per m³, sedangkan harga kayu sengon di lapangan agak lebih rendah sedikit.

Besarnya retribusi daerah terhadap produksi kayu bulat eks HPHTI bervariasi antara Rp 1.000,- per m³ (PT MHP-Sumsel) sampai sebesar rata-rata Rp 5.520,- per m³ (PT TRH-Kaltim), dengan rata-rata tertimbang Rp 1.743,91,- per m³.

Rasio nilai perhitungan pungutan rente ekonomi kayu bulat terhadap nilai keuntungan perusahaan HPHTI tahun 2002 dihitung 8,58 : 91,42. Hasil perhitungan rasio tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memungut rente ekonomi kayu bulat hutan tanaman HPHTI terlalu kecil. Apabila pembagian keuntungan bersih perusahaan HPHTI 50 : 50 dianggap moderat, maka terdapat potensi untuk menaikkan jumlah pungutan sebesar Rp 27.069,39,- per m³ produksi kayu bulat akasia pada tahun 2002 tersebut. Namun, kebijakan menaikkan pungutan rente masih sangat tergantung hasil analisis finansial keuntungan pengusaha, dan kebijakan insentif/susidi yang perlu diberikan terhadap pengusaha hutan tanaman.

B. Analisis Keuntungan Finansial Perusahaan Kayu Bulat Sistem HPHTI

Analisis keuntungan finansial perusahaan kayu bulat sistem HPHTI dengan menggunakan analisis kriteria investasi menghasilkan angka-angka sebagai berikut.

(1) Analisis B/C Ratio (B/CR)

Hasil perhitungan analisis B/C Ratio (B/CR) yang dilakukan terhadap perusahaan kayu bulat HPHTI menunjukkan bahwa dengan menggunakan tingkat bunga efektif sebesar 5,19%, rata-rata kumulatif nilai B/CR tercapai sebesar 1,258 sedikit lebih besar dari angka 1 (satu), memberikan kesimpulan sementara bahwa perusahaan kayu bulat HPHTI tergolong memiliki keuntungan yang cukup, layak usaha, kecuali HPHTI PT Inhutani III yang memiliki tingkat B/CR 0,947.

(2) Analisis Net Present Value (NPV)

Hasil perhitungan Net Present Value (NPV) yang dilakukan terhadap perusahaan kayu bulat HPHTI menunjukkan bahwa dengan menggunakan *discount rate* tingkat bunga riil sebesar 5,19%, nilai NPV dihitung rata-rata sebesar 8.186,61 (dalam rupiah) per m³ produksi kayu bulat lebih besar dari angka 0 (nol).

Dari seluruh sampel, PT Inhutani III memiliki NPV negatif sebesar -412,54, tidak layak usaha. Simulasi menggunakan *discount rate* sebesar tingkat bunga nominal 19,39% bahkan menunjukkan nilai NPV perusahaan kayu bulat HPHTI tersebut diperoleh sebesar -316,58 (minus).

Dari perhitungan NPV pada tingkat bunga diskonto 5,19% perusahaan HPHTI yang mampu meraih nilai NPV positif (Rp) adalah HPHTI PT ITCI sebesar 9.037,49; PT HRB sebesar 8.731,30; PT MHP sebesar 4.376,45; PT Kirana Rimba sebesar 2.887,92; PT TRH sebesar 5.131,42; PT WKS 11.744,54; PT Arara Abadi sebesar 9.117,04 dan PT RAPP sebesar 6.745,97 per m³ produksi kayu bulat.

(3) Analisis Internal Rate of Return (IRR)

Hasil perhitungan analisis investasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata kumulatif *Internal Rate of Return* (IRR) yang diperoleh perusahaan kayu bulat seluruh sampel HPHTI adalah sebesar 18%. Angka IRR rata-rata tersebut berada jauh di atas bunga efektif rata-rata 5,19% yang digunakan dalam penelitian ini.

Dari seluruh sampel yang diteliti, PT Inhutani III tercatat memiliki angka IRR sebesar 1%, berada jauh di bawah tingkat bunga riil 5,19% yang berlaku. Perusahaan HPHTI lainnya memiliki angka IRR di atas tingkat bunga efektif 5,19%.

Resume hasil perhitungan analisis keuntungan finansial perusahaan kayu bulat sistem HPHTI dengan menggunakan analisis kriteria investasi seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Resume Hasil Perhitungan Rata-rata Kumulatif Keuntungan Perusahaan Hasil Hutan Kayu Bulat Sistem HPHTI Tahun 2002 berdasarkan Metode Analisis Kriteria Investasi (*Investation Criteria Methods*)

Tingkat Bunga	Nilai Analisis Keuntungan			Keterangan
	B/CR	NPV *)	IRR (%)	
5,19%	1,258	8.186,61	18%	*) dalam ribuan rupiah

Sumber: Olahan Data Lapangan Tahun 2002.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari beberapa analisis keuntungan yang dilakukan, perusahaan kayu bulat sistem HPHTI pada dasarnya dinilai layak usaha. Di sisi lain jumlah pungutan rente ekonomi pemerintah yang ditetapkan berdasarkan cara *ad valorem charge* dalam bentuk PSDH maupun tambahan pungutan retribusi daerah di beberapa kabupaten/kota relatif sangat kecil dibandingkan tingkat harga jual kayu bulat di lapangan.

IV. KESIMPULAN

- A. Dari HPHTI sampel, jenis tanaman *Acasia mangium* dan daur 8 tahun, diperoleh hasil analisis bahwa dengan menggunakan faktor diskon 5,19% per tahun perusahaan HPHTI tahun pemanenan 2002 memiliki keuntungan usaha yang cukup baik, yakni Rp 59,75 ribu per m³ atau sekitar 36,87% dari biaya produksi yang dikeluarkan.
- B. Berdasarkan analisis keuntungan menggunakan kriteria investasi dengan diskon faktor tingkat bunga riil 5,19% rata-rata kumulatif nilai B/CR tercapai sebesar 1,258 lebih besar dari angka 1 (satu) atau layak usaha. Nilai NPV pada tingkat diskon 5,19% terhitung rata-rata sebesar 8.186,61 (dalam rupiah) per m³ produksi kayu bulat, menyimpulkan bahwa perusahaan kayu bulat HPHTI masih layak usaha. Rata-rata kumulatif nilai IRR yang diperoleh dari perusahaan kayu bulat seluruh sampel HPHTI adalah sebesar 18%. Angka IRR rata-rata tersebut memang nampak lebih kecil dibandingkan tingkat bunga nominal rata-rata yakni 19,39%, namun masih jauh di atas rata-rata bunga riil 5,19% yang digunakan. Perusahaan HPHTI tahun panen 2002 tersebut dianggap layak usaha.
- C. Tingkat keuntungan HPHTI tersebut sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya produksi kayu bulat, yang dalam penelitian ini tercatat hanya mencapai rata-rata sebesar 165,89 m³ per hektar, serta harga penerimaan kayu bulat di lokasi konsumen yang bervariasi antara Rp 150.000,- sampai Rp 266.615,-per m³. Harga jual tertinggi kayu bulat HPHTI diperoleh oleh perusahaan hutan tanaman yang memiliki keterkaitan usaha dengan konsumen industri pengolahan kayu, khususnya pulp & paper.

- D. Nilai jumlah pungutan PSDH dan pungutan daerah rata-rata sebesar Rp 5.611,22,- per m³ relatif kecil terhadap nilai keuntungan usaha sebesar Rp 59,75 ribu per m³ pada tingkat bunga riil 5,19% tersebut. Terhitung rasio besarnya pungutan rente ekonomi terhadap keuntungan perusahaan sebesar 8,58 : 91,42. Apabila digunakan rasio yang wajar adalah 50 : 50 dianggap moderat, maka terdapat potensi menaikkan jumlah pungutan sebesar Rp 27.069,39,- per m³ pada tahun 2002 tersebut.
- E. Kebijakan menaikkan pungutan rente ekonomi kayu bulat HPHTI disesuaikan dengan kebijakan insentif/subsidif yang perlu diberikan terhadap pengusaha hutan tanaman. Pungutan retribusi daerah di samping tidak memiliki dasar perhitungan yang tepat dan tidak seragam, dianggap berpotensi memberatkan sehingga menjadi faktor yang perlu ditinjau ulang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan efektivitas pelayanan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan. 2000. *Rekalkulasi Areal Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Tahap-1*. Pusat Data dan Perpetaan, Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan., Jakarta, 2000.
- Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman. 2001. *Daftar Realisasi Pembangunan Hutan Tanaman sampai dengan Desember 2001*. Jakarta, Desember 2001.
- , 2002. *Daftar Realisasi Pembangunan Hutan Tanaman sampai dengan Desember 2002*. Jakarta, Desember 2002.
- Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 2002. *Realisasi Produksi Kayu Bulat Nasional (m³) 5 Tahun Terakhir (1998/99 – 2002)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan. 1994. *Forested and Not Forested Area in Indonesia in 1994*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. 1997. *Data Perkembangan Luas Hutan Tanaman Industri Sampai Dengan Tahun 1996*. Jakarta.
- Gregory, G. Robinson. 1987. *Resource Economics for Foresters*. John Wiley & ons, Inc. New York.

- Handadhari, Transtoto. 2000. *Fatamorgana Kayu Bulat*. Majalah Tropis, Edisi November 2000, Jakarta.
- , 2003. *Ekonomi Sumberdaya Hutan*. Diktat Kuliah Ilmu Ekonomi Sumberdaya Hutan untuk Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru. 2003
- ITTO. 2001. *Toward a Sustainable Forest Management Strategy for Indonesia*. Jakarta.
- Joseph Buongiorno. 1987. *Forest Management and Economics*. Madison, USA. 1997.
- Sumitro, Achmad. 2000. *Analisa Investasi Penanaman Hutan*. Bahan Kuliah Ekonomi Kehutanan. Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.